

SKRIPSI

**PAJAK DAN PEREMPUAN INDONESIA:
Fenomena Kesetaraan Gender pada Penerapan Kebijakan
Penghasilan Tidak Kena Pajak di Indonesia**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI LUH GEDE MITHA PARIANI PUTERI
NIM : 2115654002**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**PAJAK DAN PEREMPUAN INDONESIA:
Fenomena Kesenjangan Gender pada Penerapan Kebijakan Penghasilan
Tidak Kena Pajak di Indonesia**

NI LUH GEDE MITHA PARIANI PUTERI

2115654002

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Isu kesetaraan gender dalam kebijakan perpajakan menjadi sorotan seiring dengan meningkatkan peran perempuan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi perempuan, terutama dalam hal pengakuan tanggungan dan peran sebagai pencari nafkah utama. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada keadilan distribusi beban pajak, namun juga berpotensi menurunkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Sementara itu, negara lain seperti Malaysia dan Singapura telah mengadopsi kebijakan pajak yang lebih inklusif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas penerapan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia yang dikaitkan dengan kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan negara Malaysia dan Singapura terkait kebijakan perpajakan terhadap kesetaraan gender. Menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PTKP masih mengandung ketimpangan gender, terutama dalam perlakuan sistem administratif terhadap perempuan yang ingin mengakui status tambahan. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang telah menerapkan sistem perpajakan berbasis *individual tax* dan insentif bagi perempuan bekerja, Indonesia masih menerapkan pendekatan *family tax unit* yang kurang responsif terhadap dinamika peran gender. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi serta reformasi sistem administrasi serta kebijakan PTKP agar lebih adil dan responsif gender.

Kata Kunci: PTKP, kesetaraan gender, Indonesia, Singapura, Malaysia

**TAXES AND INDONESIAN WOMEN:
The Phenomenon of Gender Equality in the Implementation of Non-Taxable
Income Policies in Indonesia**

NI LUH GEDE MITHA PARIANI PUTERI

2115654002

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The issue of gender equality in taxation policy has come under scrutiny as women's role in economic growth has increased. The Non-Taxable Income Policy (PTKP) is considered to be insufficiently responsive to women's circumstances, particularly in terms of recognition of dependents and their role as primary breadwinners. This disparity not only affects the fairness of tax burden distribution but also has the potential to reduce women's participation in the labor market. Meanwhile, other countries such as Malaysia and Singapore have adopted more gender-inclusive tax policies. This study aims to examine the reality of the implementation of The Non-Taxable Income Policy (PTKP) in Indonesia in relation to gender equality. Additionally, this study compares Indonesia's tax policies with those of Malaysia and Singapore regarding gender equality. Using a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews, documentation, and literature reviews. The results indicate that the PTKP policy still contains gender disparities, particularly in the administrative system's treatment of women seeking to claim additional status. Compared to Malaysia and Singapore, which have implemented individual tax-based systems and incentives for working women, Indonesia still applies a family tax unit approach that is less responsive to gender role dynamics. Therefore, there is a need for evaluation and reform of the administrative system and PTKP policies to make them more fair and gender-responsive.

Keywords: *non-taxable income, gender equality, Indonesia, Singapura, Malaysia*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	11
C. Alur Pikir.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian.....	13
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	13
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	14
D. Keabsahan Data.....	15
E. Analisis Data	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Deskripsi Hasil Penelitian	18
B. Pembahasan dan Temuan	23
C. Keterbatasan Penelitian	33
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	34
A. Simpulan	34
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	37
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran PTKP	10
Tabel 2. 2 Kajian Penelitian Relevan	11
Tabel 4. 1 Hasil dokumentasi penelitian	20
Tabel 4. 2 Perbandingan Kebijakan Negara Lain	22
Tabel 4. 3 Besaran kebijakan PTKP	30
Tabel 4. 4 Besaran kebijakan <i>Working Mother's Child Relief</i> di Singapura	31
Tabel 4. 5 Besaran kebijakan <i>Individual Tax Relief</i> di Malaysia	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proporsi Pekerja <i>Female Breadwinners</i> terhadap Total Pekerja, 2024	2
Gambar 1. 2 Data IKG ASEAN 2024	3
Gambar 4. 1 <i>Take-home pay</i> Perempuan (TK/0)	25
Gambar 4. 2 <i>Take-home pay</i> Laki-laki (K/3)	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip wawancara dengan Ibu Bahagia.....	41
Lampiran 2: Transkrip wawancara dengan Bapak Berhasil.....	45
Lampiran 3: Transkrip wawancara dengan Bapak Sukses.....	61
Lampiran 4: Transkrip wawancara dengan Ibu Lulus.....	71
Lampiran 5: Transkrip wawancara dengan Bapak Semangat	78
Lampiran 6: Pedoman Wawancara.....	98
Lampiran 7: Surat Permohonan Narasumber Penelitian	100



BAB I

PENDAHULUAN

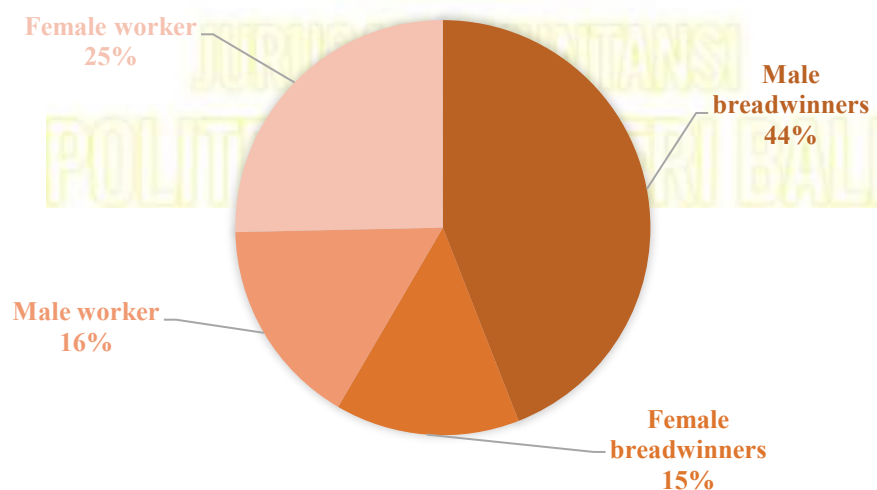
A. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah komponen penting dalam sumber pembiayaan negara serta berfungsi dalam menopang segala keperluan terkait kemakmuran rakyat (DJP, 2024) dan keberlanjutan fiskal negara. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki dimensi keadilan, di mana prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal menjadi dasar utama (Musgrave dan Mursgrave, 1989). Namun, perdebatan mengenai keadilan pajak pada era kontemporer tidak lagi hanya terbatas pada distribusi beban secara ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek kesetaraan gender dalam sistem perpajakan (OECD, 2022; Stotsky, 1997).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender menjadi isu global yang mendapat perhatian serius. Laporan World Bank (2023) menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang sensitif gender dapat meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dan memperkuat basis pajak negara terutama di saat susunan kehidupan yang baru dijalani masyarakat pasca terjadinya Covid-19 (Darmayasa & Partika, 2024). Demikian pula, OECD (2022) menyoroti masih adanya dua bentuk bias dalam perpajakan, yaitu bias eksplisit (aturan yang secara langsung membedakan perlakuan berdasarkan gender) dan bias implisit (aturan yang tampak netral tetapi berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki).

Di Indonesia, persoalan tersebut tampak nyata dalam kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menggunakan konsep *family tax unit* dengan asumsi laki-laki sebagai kepala keluarga. Merujuk pada PMK 101 Tahun 2016 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mengatur bahwa bagi perempuan yang sudah kawin hanya mendapat pengurangan PTKP sebesar Rp54.000.000 pertahunnya sedangkan bagi laki-laki yang sudah menikah mendapat peningkatan pengurangan PTKP sebesar Rp58.500.000 pertahunnya. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan perlakuan fiskal yang berpotensi menimbulkan diskriminasi struktural (Firmansyah, 2023).

Data Badan Pusat Statistika (BPS, 2024) gambar 1.1 menunjukkan bahwa proporsi perempuan sebagai pencari nafkah utama atau sering disebut *Female Breadwinners* di Indonesia terus meningkat (Setiawan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa peran perempuan dalam menopang ekonomi keluarga

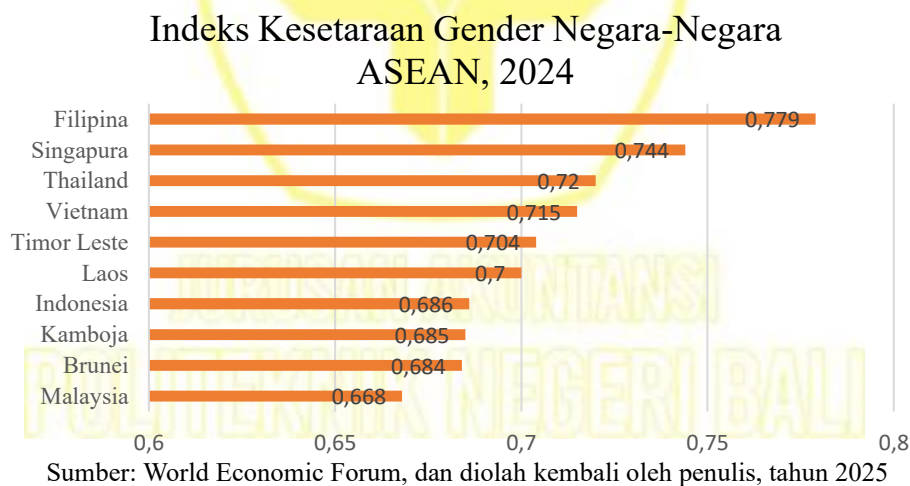


Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah kembali oleh penulis, tahun 2025

Gambar 1. 1 Proporsi Pekerja *Female Breadwinners* terhadap Total Pekerja, 2024

semakin penting, sehingga kebijakan pajak yang masih bias berpotensi menghambat pemberdayaan ekonomi mereka. Penelitian Alamanda (2023), bahkan menemukan bahwa ketimpangan gender secara statistik memiliki sebuah hubungan yang negatif signifikan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari perspektif internasional, *Global Gender Gap Report 2024* yang dirilis World Economic Forum (2024) gambar 1.2 menempatkan Indonesia pada posisi ke-100 dunia dengan skor indeks kesetaraan gender 0,686, dan menduduki peringkat ke-7 di ASEAN. Capaian ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Filipina dan Singapura.

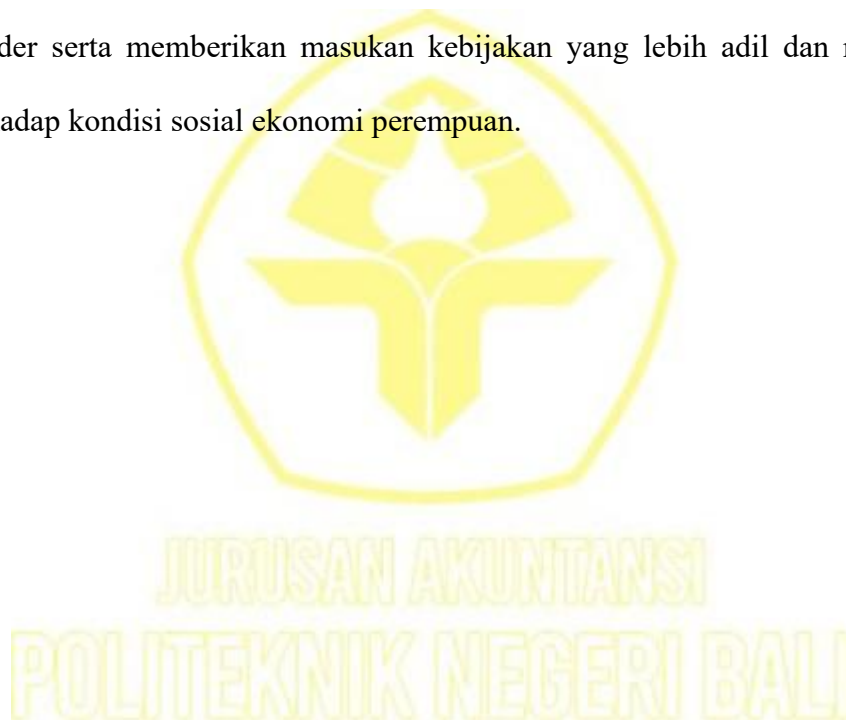


Gambar 1. 2 Data IKG ASEAN 2024

Lebih lanjut, hambatan kesetaraan dalam PTKP bukan hanya terkait besaran pengurangan pajak, tetapi juga aspek administratif. Penelitian Tambunan Maria, et al. (2025) menemukan bahwa pemepuan menghadapi proses administrasi

lebih kompleks untuk memperoleh hak PTKP dibandingkan laki-laki, karena adanya keharusan dalam mengurus dokumen tambahan. Kompleksitas administrasi ini memperkuat keadilan yang dihadapi perempuan dalam sistem perpajakan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta tadi, penting untuk menelaah secara kritis penerapan kebijakan PTKP di Indonesia, khususnya terkait implikasinya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai perpajakan berbasis gender serta memberikan masukan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan.



B. Rumusan Masalah

Menyoroti latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang mengikat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas penerapan PTKP terhadap kesetaraan gender di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk kebijakan perpajakan negara lain dalam mengatasi masalah kesetaraan gender?

C. Batasan Masalah

Peneliti menetapkan batasan yang akan dibahas agar penelitian ini menjadi memiliki fokus pada suatu titik permasalahan. Penelitian ini dibatasi pada kebijakan perpajakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ada di Indonesia serta bentuk kebijakan perpajakan negara lain dalam mengatasi kesetaraan gender bagi perempuan. Fokus pada realitas penerapan kebijakan PTKP yang ada di Indonesia dengan subjek wawancara Akademisi, Konsultan, Praktisi, dan Pengampu Kebijakan. Kebijakan perpajakan negara lain yang digunakan adalah kebijakan Negara Singapura dan Malaysia, dikarenakan kedua negara tersebut merupakan negara tetangga Indonesia dan memiliki akses informasi yang terperinci untuk dijadikan bahan penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan susunan rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mampu mengidentifikasi realitas penerapan PTKP terhadap ketidaksetaraan gender di Indonesia.
- b. Mampu menganalisis kebijakan perpajakan negara lain dalam mengatasi masalah kesetaraan gender di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan susunan rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan manfaat dari penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Mampu menambah sudut pandang baru terkait realitas penerapan PTKP terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian lain kedepannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai sumber informasi dan bahan literasi terkait isu kesetaraan gender dalam kebijakan perpajakan di Indonesia.

2) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam memberikan suatu pandangan terkait pentingnya pelaksanaan reformasi kebijakan perpajakan yang lebih mengadopsi unsur kesetaraan gender.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat memberikan solusi terhadap masalah kesetaraan gender yang ada di masyarakat, sehingga Politeknik Negeri Bali dapat

berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat melalui bahan literasi.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait topik serupa.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menemukan 2 (dua) bentuk realitas penerapan kebijakan PTKP terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Bentuk pertama yaitu terdapat ketimpangan besaran *take-home pay* antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Bentuk kebijakan PTKP yang pada dasarnya belum memperhitungkan kesetaraan gender di dalamnya membuat masih banyak bias ketimpangan gender muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Di samping itu, perbedaan biaya hidup antar wilayah serta masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam sektor formal menambah kompleksitas dalam mewujudkan kesetaraan gender. Bentuk kedua adalah sistem administrasi di mana perempuan harus memenuhi syarat tambahan yang lebih rumit, terutama dalam kondisi tertentu seperti perceraian atau ketidakhadiran laki-laki, di mana perempuan tetap harus memenuhi persyaratan administratif tambahan untuk mengklaim haknya atas PTKP. Di sisi lain, laki-laki cenderung memperoleh status perpajakan secara otomatis tanpa proses administratif yang rumit. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan PTKP belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kesetaraan gender di dalamnya dan belum mempertimbangkan realitass sosial-ekonomi yang dihadapi oleh perempuan.

Di sisi lain, perbandingan dengan negara Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa pendekatan individual *tax* unit serta pemberian insentif khusus bagi ibu bekerja dapat menjadi praktik kebijakan yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Kedua negara tersebut menunjukkan adanya upaya dalam mendukung peran ganda perempuan dalam rumah tangga keluarga. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap sistem perpajakan di Indonesia, terutama pada aspek desain dan administrasi PTKP, agar lebih adaptif terhadap dinamika peran gender. Reformasi kebijakan perpajakan yang berperspektif kesetaraan akan menjadi langkah penting menuju sistem fiskal yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.

B. Saran

1. Otoritas Pajak

Diharapkan adanya evaluasi dan reformasi terhadap kebijakan PTKP yang lebih sederhana, adil, dan terintegrasi. Agar kedepannya kebijakan perpajakan di Indonesia lebih responsif terhadap kesetaraan gender sehingga dapat mendorong efektivitas tenaga kerja perempuan dalam pertumbuhan ekonomi di masa depan.

2. Politeknik Negeri Bali

Diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian terkait kebijakan perpajakan yang menggabungkan isu kesetaraan gender dalam kurikulum maupun penelitian mahasiswa. Selain itu diharapkan dukungan dalam menyediakan wadah diskusi kritis serta dukungan riset yang berfokus

kesetaraan gender agar menghasilkan penelitian yang relevan dengan dinamika sosial masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dan membahas terkait kebijakan negara Malaysia dan Singapura saja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan negara lain yang ada di dunia. Selain itu peneliti selanjutnya dapat mengkaji dampak implementasi *individual tax unit* terhadap kesetaraan gender di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Y. A. (2023). Studi Literatur: Arti, Cara Membuat dan Contoh. *Deepublish*.
<https://deepublishstore.com/blog/studi-literatur/>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2013). *1 Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Badan Kebijakan Fiskal*. 1–12.
- Biettant, R., Bieattant, L., Sugondo, L. Y., Pujiyanthi, E., Andrian, P. D., & Charlie, C. (2020). Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Bagi Guru-Guru Akuntansi SMK Di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145–151.
<https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.737>
- Budileksmana, A. (2020). Jurnal Peranan Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 1(2), 77–84.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Journal of Tax and Business*, 2(2), 75–83.
<https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36>
- Creswell, J. W., Qudsy, S. Z., & Lazuardi, A. L. (2015). *Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches* (S. Z. Qudsy (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Darmayasa, I. N., & Partika, I. D. M. (2024). Reconstruction Concept of The Meaning of Permanent Establishment Physical Presence for Tax Purposes. *Journal of Tax Reform*, 10(1), 38–50.
<https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.1.155>
- DJP. (2022). *Asas Pemungutan Pajak*. <https://pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- DJP. (2024). *Manfaat Pajak untuk Program Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/manfaat-pajak-untuk-program-pembangunan-dan-kesejahteraan-masyarakat>
- Drummond, E. (2025). How Singapore Working Mothers Pay Less Tax Thanks to Child Relief. *OSOME*. <https://osome.com/sg/blog/how-singapore-working-mothers-pay-less-tax-thanks-to-child-relief/>
- Fiantika, F., Wasil, M., Jumiyanthi, S., & Honesti, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Firmansyah, A. W. (2023, September). Membangun Keadilan dan Kesetaraan Pajak. *Redaksi DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/gender-based-taxation-membangun-keadilan-dan-kesetaraan-pajak-1797166>
- Funding Societies. (2024). *Tax Relief 2024: Everything You Can Claim for Income Tax Malaysia* (YA 2024).
<https://blog.fundingsocieties.com.my/personal-income-tax-relief-malaysia/>

- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*.
- IRAS. (2025). *Working Mother's Child Relief (WMCR)*. [https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/working-mother's-child-relief-\(wmcr\)](https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-reliefs-rebates-and-deductions/tax-reliefs/working-mother's-child-relief-(wmcr))
- Khosen, I. (2025). Kebijakan Fiskal untuk Kartini Zaman ini. *Pratama Institute*. <https://pratamainstitute.com/kebijakan-fiskal-untuk-kartini-zaman-ini>
- Lambert, I. T. G. (1992). Some Modern Principles of Taxation-Adam Smith Revisited. *3rd Annual Convention of Political Economists*.
- Milles, M., & Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Musgrave, R. A., & Mursgrave, P. B. (1989). Public Finance In Theory and Practice. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2). <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Nielsen, H. (2023). *Taxation and Gender in Asia and the Pacific: A Review of Gender Equality Provisions in Fiscal Legal Frameworks* (Issue 87). <https://doi.org/10.22617/WPS230271-2>
- OECD. (2022). *Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches: Overview*. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-and-gender-equality_b8177aea-en
- Putra, K. J. S. (2024). NPWP Suami-Isteri Lebih Baik Digabungkan Atau Dipisah? *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://stats.pajak.go.id/id/artikel/npwp-suami-isteri-lebih-baik-digabungkan-atau-dipisah?>
- Putri, H. N. (2021). Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif, Beserta Penjelasannya. *Vocasias*. <https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>
- RevoEdu. (2025). *Paradigma Kritis dalam Penelitian Sosial*. <https://revoedu.org/article/paradigma-kritis-dalam-penelitian-sosial/>
- Salmaa. (2023). Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh. *Deepublish*. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>
- Setiawan, V. N. (2025). Ramai Perempuan “Raksasa” di RI, Terbanyak Ada di Lokasi Ini. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250412111418-33-625432/ramai-perempuan-raksasa-di-ri-terbanyak-ada-di-lokasi-ini>
- Stotsky, J. G. (1997). How tax systems treat men and women differently. *Finance and Development*, 34(1), 30–33.
- The Academy of Tax Law. (2025). *Tax Authority*. <https://academyoftaxlaw.com/glossary/role-of-tax-authorities/>

- Widodo, A., & Ardana, P. S. (2020). Women Tax Care: Kebijakan, Penerapan, Potensi, dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1009>
- Wijayanto, D., Rahayu, A. D., & Ariefiara, D. (2025). Tax Fairness in Women Taxpayers' Non Taxable Income (PTKP) and Women's Labor Force Participation Rates. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 6(2), 451–460. <https://doi.org/10.35912/jakman.v6i2.3834>

